

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan

Cherrya Dhia Wenny

STIE MDP

cherryadhia@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009 yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : pendapatan asli daerah, kinerja keuangan.

Abstract : The purpose of this research is to determine the effect of the local original revenue (PAD) on the financial performance of the countries and cities in South Sumatera Province either simultaneously or partially. The data used are the countries and cities budget reports and budget realization reports in South Sumatera Province from 2005-2009, published by Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. The method of analysis used is quantitative analysis, with the multiple regression models. The research shows that the local original revenue (PAD) has impact on financial performance simultaneously. However, partially, only other local original revenue have a dominant influence on financial performance, while local taxes, levies, the property of companies and the separated regional assets is not dominant affect on the financial performance of the countries and cities in South Sumatera Province.

Keywords : local original revenue, financial performance.

1. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah pada masa Pra Reformasi ditetapkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Kelahiran Undang-Undang ini dilatar-belakangi oleh prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, serta mengatur pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Namun, dalam perjalanannya, nuansa sentralisasi dalam Undang-Undang ini lebih kuat dibandingkan desentralisasi. Belum adanya kepastian mengenai kewenangan dan perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah serta adanya kekuasaan terpusat (sentralisasi), mengindikasikan

bahwa tidak ada pemisahan antara peran eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Memasuki era reformasi pada pertengahan tahun 1998, timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Reformasi di Indonesia ini turut mengubah sistem kehidupan negara, seperti adanya tuntutan *Good Governance* dan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Era Reformasi diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada Presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang No 25 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2007 : 229). Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD

yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penelitian Dian Batubara mengatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

James B. Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwujudan *good governance*. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Faktanya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Anwar Nasution dalam artikel AntaraNews tahun 2007 menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, ternyata kinerja pemerintah daerah (pemda) di tanah air masih jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah Rasio Upaya fiskal. Rasio ini membandingkan antara total realisasi PAD terhadap total anggaran PAD sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dian Nofriana Batubara tahun 2009. Dian Nofriana Batubara telah meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara. Sementara secara parsial hanya

pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut senada dengan penelitian Asha florida (2007) yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, yaitu sebesar 68%. Namun, secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang secara signifikan berpengaruh, sedangkan dua variable lainnya tidak dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Dengan menggunakan rasio upaya fiskal dalam menghitung kinerja keuangan daerah, penulis mencoba meneliti seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, serta komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah apa saja yang secara dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Selatan periode 2005 – 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batasan dari objek penelitian ini adalah: (1) Rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio upaya fiskal; (2) Objek penelitian adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: (1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah: (1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. (2) Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik. (3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah. (4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakatnya.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2.3. Teori Anggaran

Menurut Glen A. Welsch dalam bukunya berjudul *Budgeting* menyebutkan bahwa anggaran merupakan suatu bentuk *statement* daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/*blue print* dalam periode itu. Beberapa fungsi anggaran, yaitu : (1) Sebagai instrumen politik, artinya anggaran merupakan salah satu instrument formal yang mewujudkan *bargaining*

eksekutif dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislatif. (2) Instrumen Kebijakan Fiskal. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya. (3) Instrumen Perencanaan. Anggaran menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya, dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja. (4) Instrumen Pengendalian. Anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja, sehingga unit kerja tidak melakukan *overspending*, *underspending*, atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD/N merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

2.5. Kinerja Keuangan Daerah

James B. Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate*

for *Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut (Bastian, dikutip dalam Batubara, 2009):

1. Rasio Kemandirian

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$= \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan pemerintah pusat propinsi dan pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Rasio Upaya fiskal

Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Asli daerah}}$$

Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

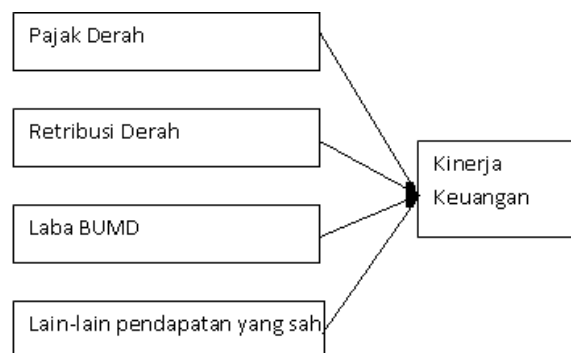
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}}$$

atau

$$\frac{\text{Bagi hasil dan bukan pajak untuk daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.6. Kerangka Pemikiran

Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya karena kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan dan kekayaan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah). Berikut hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Hubungan Antar Variabel Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan desain kausal dalam penelitian ini. Desain kausal dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Kuncoro, 2001:16). Hubungan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen mempengaruhi kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan selama periode 2005-2009 yang berjumlah 15, terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota, kemudian peneliti mengambil sampel dengan alasan sebagai berikut :

1. Populasi yang banyak sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruh elemen penelitian,
2. Keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, artinya setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Mustafa, 2000). Pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD di Badan selama tahun 2005-2009.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala numerik dan merupakan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan berupa Laporan APBD Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009 dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2009.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 17. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

2. Pengujian hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dimana model persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kinerja (Variabel dependen)
A : Konstanta.
X1 : Pajak daerah (Variabel independen)
X2 : Retribusi daerah (Variabel independen)
X3 : Hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan (Variabel independen)
X4 : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Variabel independen)
 ε : Tingkat kesalahan pengganggu

a. Uji t (T-Test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

b. Uji F (F-Test)

Uji F statistik digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama (serentak) terhadap variabel tidak bebas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan, diperoleh enam kabupaten dan kota yang dijadikan sampel.

Tabel 1: Daftar Sampel Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten OKU Selatan
2.	Kabupaten Ogan Ilir
3.	Kabupaten Banyuasin
4.	Kota Prabumulih
5.	Kota Pagar Alam
6.	Kota Lubuk Linggau

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi dan target APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009. Kinerja Keuangan merupakan variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Statistik deskriptif dari variabel tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2: Nilai Analisis Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximun	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	30	19.2E8	5.65E9	2.6200E9	1.46483E9
Retribusi Daerah	30	0.00	4.85E9	2.734E9	1.17127E9
Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah	30	0.00	1.52E9	2.9973E8	3.78370E8
Lain-lain PAD yang Sah	30	0.00	2.12E10	6.7404E9	5.50760E9
Kinerja Keuangan	30	0.49936	3.44400	1.2222014	0.60081769
Valid N (Listwise)	30				

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

Semua variabel memiliki nilai maksimum dan minimum positif. Data tabel tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum 1.92E8 dan maksimum 5.65E9 dengan rata-rata pajak daerah sebesar 2.6200E9 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten dan kota.
2. Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 4.85E9 dengan rata-rata retribusi daerah sebesar 2.2734E9 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten dan kota.
3. Variabel hasil perusahaan dan kekayaan daerah memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1.52E9 dengan rata-rata hasil perusahaan dan kekayaan daerah sebesar 2.9973E8 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten dan kota.
4. Variabel lain-lain PAD yang sah memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 2.12E10 dengan rata-rata lain-lain PAD yang sah sebesar 6.7404E9 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten dan kota.

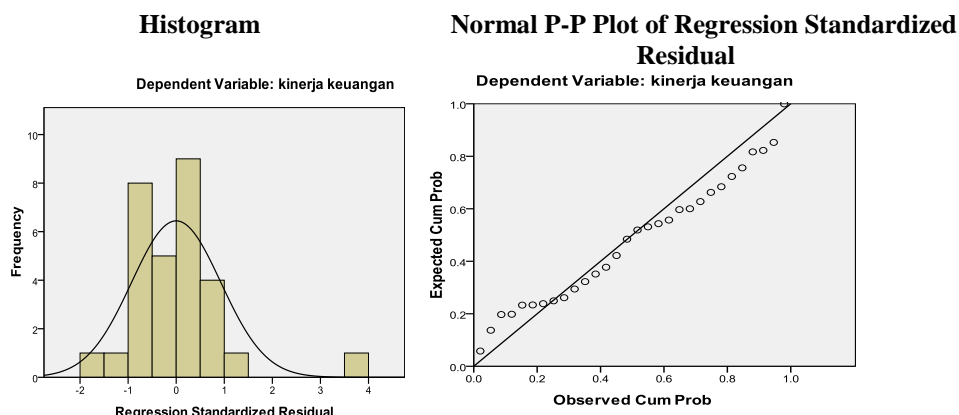
5. Variabel kinerja memiliki nilai minimum 0.49936 dan maksimum 3.44400 dengan rata-rata kinerja daerah sebesar 1.2222014 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten dan kota.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal. Pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S).

Nilai K-S dari pengolahan data tersebut sebesar 0,618 dan signifikansi sebesar 0,840 (0,840 > 0,05), maka disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar 2: Histogram dan P-Plot

Tabel 3 : Nilai Uji Statistik Non-Parametrik K-S

One-Sample Kolmogorov-Smicnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Means	0.0000000
	Std. Deviation	0.43347160
Most Extreme Differences	Absolute	0.113
	Positive	0.103
	Negative	-0.113
Kolmogorov-Smicnov Z		0.618
Asymp. Sig (2-tailed)		0.840

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *tolerance* > 0,10 dan perhitungan VIF juga memiliki nilai < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 4 : Nilai Tolerance dan VIF

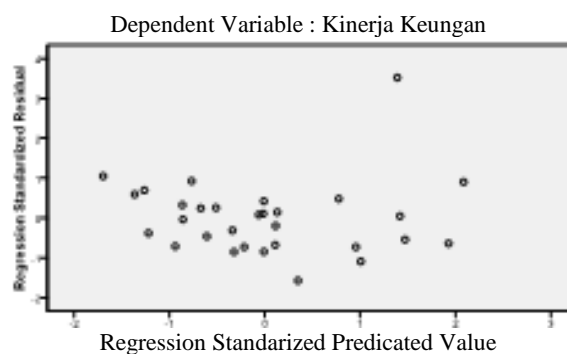
Coefficients^a

Model	Collinerity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pajak Daerah	258	3.879
Retribusi Daerah	320	3.126
Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah	559	1.789
Lain-lain PAD yang Sah	579	1.736

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

4.2.3. Uji heteroskedastisitas

Titik-titik pada grafik *Scatterplot* di bawah ini menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi



Gambar 3: Grafik Scatterplot

4.2.4. Uji Autokorelasi

Nilai statistik Durbin Watson (D-W) sebesar 2,050. Tabel D-W menunjukkan dL dan dU

masing-masing untuk $k = 4$ dan $n = 30$, $\alpha = 0,5$ adalah 1,1426 dan 1,7386. Berarti $dU < DW < 4-dU$ ($1,7386 < 2,050 < 2,2614$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5: Nilai Statistik Durbin-Watson

<i>Model Summary^a</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.692 ^a	0.479	396	0.46686320	2.050

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

4.3. Analisis Regresi

4.3.1. Persamaan Regresi

Tabel 6 : Nilai Koefisien Regresi Untuk Kinerja Keuangan Dengan Komponen PAD

<i>Coefficients</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	1.430	0.195		7.326	0.000
Pajak Daerah	-2.016E-10	0.000	-0.491	-1.729	0.096
Retribusi Daerah	-1.050E-10	0.000	-0.205	-0.802	0.430
Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah	3.952E-10	0.000	0.249	1.290	0.209
Lain-lain PAD yang Sah	6.532E-11	0.000	0.599	3.150	0.004

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,430 - 2,016E-10 X_1 - 1,050E-10 X_2 + 3,952E-10 X_3 + 0,6532E-11 X_4$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 1,430 menunjukkan apabila tidak ada variabel independen, maka kinerja sebesar 1,430 ;
- β_1 sebesar -2,016E-10 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar -2,016E-10 dengan asumsi variabel lain tetap ;

- β_2 sebesar -1,050E-10 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar -1,050E-10 dengan asumsi variabel lain tetap ;
- β_3 sebesar 3,952E-10 menunjukkan bahwa setiap kenaikan hasil perusahaan dan kekayaan daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 3,952E-10 dengan asumsi variabel lain tetap ;
- β_4 sebesar 0,6532E-11 menunjukkan bahwa setiap kenaikan lain-lain PAD yang sah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 0,6532E-11 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3.2. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,692 berarti korelasi antara kinerja dengan variable independennya (pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD

yang sah) sangat kuat karena lebih dari 0,5. *Adjusted R square* atau koefisien korelasi sebesar 0,396 berarti 39,6% variasi atau perubahan dalam kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah, sedangkan sisanya 60,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

Tabel 7: Koefisien Korelasi Antara Kinerja Dengan Komponen PAD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.692 ^b	0.479	0.396	0.46686320	2.050

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1 Uji T (T-Test)

Tabel 8: Nilai T-Hitung Untuk Komponen PAD

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.430	0.195		7.326	0.000
Pajak Daerah	-2.016E-10	0.000	-.491	-1.729	0.096
Retribusi Daerah	-1.050E-10	0.000	-.205	-0.802	0.430
Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah	3.952E-10	0.000	.249	1.290	0.209
Lain-lain PAD yang Sah	6.532E-11	0.000	.599	3.150	0.004

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

Tabel di atas menunjukkan :

- a. Variabel pajak daerah, t hitung < t tabel (-1,729 < 2,05954), Signifikansi menunjukkan angka > 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak, artinya pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- b. Variabel retribusi daerah, t hitung < t tabel (-0,802 < 2,05954), Signifikansi menunjukkan angka > 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak, artinya retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- c. Variabel hasil perusahaan dan kekayaan daerah, besarnya, t hitung < t tabel (1,290 < 2,05954), Signifikansi menunjukkan angka > 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak, artinya hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

- d. Variabel lain-lain PAD yang sah, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,150 < 2,05954$), Signifikansi menunjukkan angka $< 0,05$ H_0 ditolak, artinya lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.4.2. Uji F (F-Test)

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,757 > 2,76$) dan signifikansi penelitian kurang dari 0,05 ($0,002 < 0,05$)

Tabel 9: Nilai F-Hitung Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<i>ANNOVA^b</i>					
Model	Sum of Squares	df	Means Square	F	Sig.
1 Regression	5.019	4	1.255	5.757	0.002 ^b
Residual	5.449	25	0.218		
Total	10.468	29			

Sumber : Hasil pengolahan data 2011

Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan SPSS versi 17, diketahui bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,396 menunjukkan 39,6% variasi atau perubahan dalam kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah, sedangkan sisanya 60,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat penelitian ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anhar, Bram. 2011. *BPS Sumsel : Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tahun 2010 Mengalami Peningkatan Sebesar 5,4 %*. Artikel Online. (<http://www.sriwijayativ.com/detBerita.php?ref=isi&ix=436>, diakses tanggal 11 Mei 2011).
- [2] Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [3] Batubara, Dian Nofrina. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19120/7/Cover.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010).
- [4] Florida, Asha. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4027>, diakses tanggal 4 Desember 2010).
- [5] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [6] Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- [7] Haryanto, Joko Tri, *Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*. Artikel Online. (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CPAD.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010)
- [8] Hasan, Mustafa. 2000. *Teknik Sampling*, Jakarta : Erlangga.
- [9] Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN.
- [10] Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [11] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 2008.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Jakarta 2010.
- [13] Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (<http://eprints.uns.ac.id/6/1/169921211201009511.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010).
- [14] Yuliandriansyah. 2009. *Otonomi Daerah dan Investasi*. Artikel Online. (<http://yuliandriansyah.staff.uin.ac.id/2009/02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/>, diakses tanggal 21 Januari 2011)
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.
- [16] _____. 2009. *Prospek Ekonomi Sumsel 2009*. Artikel Online. (http://palembangtribunnews.com/view4349/prospek_ekonomi_sumsel_2009, diakses tanggal 3 Februari 2011)
- [17] _____. 2007. *Ketua BPK: Kinerja Pemda Masih Jauh dari Memuaskan*. Artikel Online. (antaranews.com, diakses tanggal 8 Desember 2010)
- [18] Welsch, Glenn A, Ronald W. Hilton, dan Paul N. Gordon. 1995. *Budgeting*

(Penyusunan Anggaran Perusahaan)
Perencanaan dan Pengendalian Laba.
Jakarta: Bumi Aksara

- [19] Whittaker, James B. 1995. *The Government Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institut: Arlington, Virginia.